

Diseminasi konversi Penyajian Laporan Keuangan Aset Biologis Industri Perikanan Budidaya Air Tawar Berdasarkan PSAK 69

Emrinaldi Nur DP¹, Yesi Mutia Basri², Ruhul Fitrius³, Azwir Nasir⁴, Rusli⁵, Vince Ratnawati⁶, Hardi⁷, Pipin Kurnia⁸, Poppy Nurmayanti⁹, Aulia Pinto Atami¹⁰, Sri Indrastuti S¹¹, Detri Karya¹²

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

^{11,12}Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Riau

*e-mail: emrinaldinur@lecturer.unri.ac.id

Abstract

Floating net cage (FNC) aquaculture in Lake Maninjau plays a vital role in supporting the local economy. However, many entrepreneurs still face challenges in preparing financial statements for biological assets in accordance with PSAK 69. This community engagement program applied the Participatory Action Research (PAR) method through group discussions, technical assistance, financial reporting simulations, and joint reflections. The results show an improvement of 35% in accounting literacy, and 72% of participants were able to prepare simple fair value-based financial statements. These findings highlight that PSAK 69 can be adjusted to suit the characteristics of MSMEs, thereby enhancing financial reporting accountability and facilitating access to financing. The program not only provides practical benefits for FNC farmers in Lake Maninjau but also offers a conceptual contribution to the development of applied accounting practices relevant to small-scale aquaculture enterprises.

Keywords: PSAK 69, Biological Assets, Financial Statements, MSMEs, PAR, KJA

Abstrak

Budidaya ikan keramba jaring apung (KJA) di Danau Maninjau berperan penting dalam mendukung perekonomian lokal. Namun, pelaku usaha masih menghadapi kendala dalam menyusun laporan keuangan aset biologis sesuai PSAK 69. Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR) melalui diskusi kelompok, pendampingan teknis, simulasi laporan, dan refleksi bersama. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan literasi akuntansi sebesar 35% dan 72% peserta mampu menyusun laporan keuangan sederhana berbasis nilai wajar. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan PSAK 69 dapat disesuaikan dengan karakteristik UMKM, sehingga meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan sekaligus membuka akses pembiayaan. Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat praktis bagi pembudidaya ikan KJA, tetapi juga menawarkan kontribusi konseptual dalam pengembangan akuntansi terapan yang relevan dengan sektor perikanan kecil.

Kata kunci: PSAK 69, Aset Biologis, Laporan Keuangan, UMKM, PAR, KJA

1. PENDAHULUAN

Industri perikanan budidaya air tawar memiliki kontribusi penting bagi perekonomian daerah maupun nasional. Selain sebagai sumber protein hewani yang terjangkau, sektor ini juga membuka lapangan kerja luas bagi masyarakat. Sumatera Barat menempati posisi strategis karena memiliki potensi perairan darat yang melimpah, mulai dari danau, sungai, hingga kolam buatan. Berdasarkan *Sensus Pertanian 2023*, tercatat sekitar 25.463 pengelola usaha perorangan budidaya ikan air tawar, atau lebih dari 62% dari total pelaku usaha perikanan perorangan yang berjumlah 40.880 di Sumatera Barat. Angka ini menegaskan dominasi subsektor budidaya air tawar dalam struktur perikanan provinsi tersebut (Badan Pusat Statistik [BPS], 2023).

Dari sisi produksi, sektor ini menjadi penyumbang signifikan terhadap kebutuhan pangan dan perekonomian daerah. Data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat (2022) menunjukkan bahwa total produksi ikan budidaya mencapai lebih dari 173 ribu ton per tahun, dengan kontribusi terbesar berasal dari Danau Maninjau melalui sistem keramba jaring apung. Hasil produksi tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, tetapi juga dipasarkan ke wilayah regional dan nasional, sehingga memperkuat peran Sumatera Barat sebagai salah satu sentra perikanan air tawar di Indonesia. Nilai ekonomi yang dihasilkan bahkan mencapai triliunan

rupiah per tahun, yang secara langsung mendorong pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah.

Selain faktor ekonomi, perikanan budidaya air tawar juga berperan dalam aspek sosial masyarakat. Ribuan rumah tangga menggantungkan hidup pada kegiatan ini, baik sebagai pembudidaya, pekerja, maupun pelaku usaha dalam rantai pasok, mulai dari penyedia pakan hingga distribusi hasil panen. Aktivitas ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan nilai budaya lokal yang berlandaskan pada prinsip keberlanjutan. Dengan demikian, sektor perikanan budidaya air tawar di Sumatera Barat memiliki arti strategis, sehingga perlu dikelola dengan pendekatan modern dan akuntabel, termasuk melalui praktik pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Dalam kerangka akuntansi, karakter aset biologis seperti ikan yang nilai wajarnya berubah dari waktu ke waktu menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan. Untuk menangani hal ini, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengadopsi IAS 41 (Agriculture) ke dalam PSAK 69 (Agrikultur), yang mewajibkan pengakuan aset biologis berdasarkan nilai wajar dan pencatatan perubahan nilai wajarnya dalam laporan laba rugi (IAI, 2018). Prinsip ini dimaksudkan agar informasi keuangan yang dihasilkan lebih relevan, andal, dan mencerminkan kondisi ekonomi aktual dari aset biologis yang terus mengalami pertumbuhan maupun risiko biologis.

Dalam konteks industri perikanan, PSAK 69 memiliki relevansi tinggi karena ikan sebagai aset biologis mengalami pertumbuhan biomassa yang secara langsung meningkatkan nilai ekonominya dari waktu ke waktu. Misalnya, benih ikan nila yang ditebar di keramba jaring apung di Danau Maninjau pada awal siklus budidaya memiliki nilai ekonomi relatif rendah, namun seiring dengan pertumbuhan hingga mencapai ukuran konsumsi, nilai wajarnya meningkat signifikan. PSAK 69 mengatur agar peningkatan nilai ini tidak hanya diakui ketika ikan dijual, tetapi juga dicatat secara periodik dalam laporan laba rugi, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kinerja ekonomi usaha budidaya (IAI, 2018; Herawaty & Wiryadi, 2020).

Namun dalam praktik, terdapat kesenjangan signifikan antara standar yang ditetapkan dan penerapannya di lapangan. Banyak pelaku UMKM budidaya ikan air tawar, khususnya di daerah seperti Maninjau, masih menggunakan pencatatan sederhana berbasis kas atau biaya historis yang hanya fokus pada pengeluaran dan penerimaan kas harian tanpa memperhitungkan perubahan nilai wajar aset biologis. Hal ini berimplikasi pada laporan keuangan yang kurang mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya, sehingga informasi yang dihasilkan tidak relevan untuk pengambilan keputusan, baik bagi pemilik usaha, investor, maupun lembaga keuangan (Sari, dkk., 2021). Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi akuntansi dan keterbatasan pemahaman terhadap konsep nilai wajar menjadi faktor utama keterlambatan adopsi PSAK 69 di kalangan pelaku UMKM sektor agrikultur dan perikanan (Handayani & Yuliastuti, 2021; Simanjuntak, 2020).

Lebih jauh, minimnya akses terhadap pelatihan dan pedoman teknis PSAK 69 semakin memperbesar gap antara teori dan praktik di lapangan. Pelaku usaha perikanan budidaya, yang sebagian besar beroperasi secara informal dan berskala kecil, cenderung memandang penyusunan laporan keuangan formal sebagai beban tambahan ketimbang sebagai instrumen strategis untuk memperluas akses modal. Akibatnya, banyak dari mereka gagal memenuhi standar yang dibutuhkan untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan atau investor karena laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kondisi ini sejalan dengan temuan bahwa keterbatasan regulasi yang efektif, lemahnya pendampingan teknis, dan kurangnya insentif pemerintah turut memperlambat penerapan PSAK 69, sehingga manfaat dari transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan belum sepenuhnya dirasakan oleh sektor perikanan budidaya (Prasetyo, 2022; Putri & Santoso, 2021).

Fenomena gap juga terlihat jelas dalam konteks Danau Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Danau seluas sekitar 24.800 hektar ini menjadi pusat aktivitas budidaya ikan dengan penggunaan ribuan unit Keramba Jaring Apung (KJA) sebagai sarana utama produksi.

Berdasarkan data terbaru, tercatat sekitar 23.359 petak KJA yang terpasang di Danau Maninjau, dengan lebih dari 15.000 di antaranya (sekitar 70%) masih beroperasi aktif hingga saat ini (Kaba12Merdeka, 2023). Skala produksi yang demikian besar menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian lokal. Namun, dengan dominasi pelaku usaha kecil dan menengah yang sebagian besar tidak memiliki sistem pencatatan akuntansi memadai, penerapan PSAK 69 menjadi tantangan signifikan.

Lebih lanjut, kerentanan ekosistem Danau Maninjau terhadap degradasi lingkungan memperburuk permasalahan akuntansi di sektor ini. Praktik budidaya dengan kepadatan tinggi sering menimbulkan kematian massal ikan akibat fenomena *upwelling* dan kualitas air yang menurun drastis, yang mengakibatkan kerugian ekonomi besar bagi pembudidaya (Syandri et al., 2020). Dalam situasi ini, pencatatan berbasis biaya historis tidak mampu mencerminkan realitas kerugian maupun perubahan nilai wajar secara akurat. Hal ini menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak hanya kurang relevan, tetapi juga menurunkan kredibilitas usaha ketika berhadapan dengan pihak eksternal seperti bank, investor, maupun pemerintah..

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah sejauh mana para pelaku budidaya, khususnya yang bersifat perorangan dan informal, benar-benar memahami serta kompeten dalam menerapkan prinsip pengakuan nilai wajar dalam laporan keuangan mereka. Realitasnya, tingkat kepatuhan terhadap PSAK 69 masih jauh dari optimal, bahkan pada sektor agrikultur formal. Meilansari, Maslichah, dan Mawardi (2019) mencatat bahwa hanya 53,3% perusahaan perkebunan yang menerapkan PSAK 69 sesuai ketentuan, sementara sisanya cenderung menggunakan pendekatan biaya historis. Simanjuntak (2020) menambahkan bahwa 87,5% perusahaan yang mengaku telah mengadopsi PSAK 69 masih belum konsisten dalam mengukur nilai wajar aset biologisnya. Jika angka ketidakpatuhan ini terjadi di sektor formal yang memiliki akses sumber daya lebih baik, maka potensi penerapan PSAK 69 di sektor informal seperti UMKM perikanan budidaya air tawar—yang jumlahnya mencapai lebih dari 25 ribu unit di Sumatera Barat (BPS, 2023)—tentu menghadapi tantangan yang jauh lebih serius.

Tantangan tersebut semakin nyata ketika dikaitkan dengan keterbatasan literasi akuntansi dan akses teknologi valuasi nilai wajar di kalangan pelaku usaha mikro. Studi Handayani dan Yuliasuti (2021) menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM agrikultur masih menggunakan pencatatan berbasis kas atau biaya historis, karena menganggap metode nilai wajar terlalu rumit dan mahal untuk diterapkan. Keterbatasan ini berdampak pada kualitas laporan keuangan yang disajikan, di mana informasi tentang fluktuasi nilai biologis ikan tidak terefleksikan secara memadai.

Rendahnya literasi akuntansi di kalangan pelaku UMKM budidaya membuat pemahaman mengenai konsep nilai wajar sebagaimana diatur dalam PSAK 69 sulit diaplikasikan secara konsisten (Handayani & Yuliasuti, 2021). Regulasi yang dirumuskan dengan basis perusahaan besar cenderung kurang adaptif terhadap kondisi usaha kecil, sehingga penerapannya tidak jarang hanya bersifat formalitas atau bahkan diabaikan sama sekali (Simanjuntak, 2020). Ketiadaan pencatatan yang memadai tidak hanya mengurangi akurasi informasi keuangan, tetapi juga menghambat akses permodalan dari lembaga keuangan, karena laporan yang tersedia tidak memenuhi standar akuntabilitas yang dipersyaratkan (Meilansari, Maslichah, & Mawardi, 2019). Dengan demikian, gap antara regulasi akuntansi yang ideal dan praktik di lapangan menjadi semakin nyata dan mendesak untuk diatasi.

Mengingat hal di atas, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat yang berisi kolaborasi dua perguruan tinggi, berusaha mengisi kekosongan literasi tersebut pada pelaku usaha budidaya ikan air tawar, khususnya di kawasan Danau Maninjau, Sumatera Barat. Fokus kegiatan pada pemilik dan pengelola keramba jaring apung skala kecil hingga menengah. Metode pelaksanaan akan dilakukan melalui pendekatan *participatory action*, yakni melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pembelajaran. Bentuk kegiatannya berupa *Focus Group Discuss* (FGD) berbasis kasus nyata budidaya ikan, serta pendampingan pencatatan transaksi menggunakan buku kas hingga simulasi penyusunan laporan keuangan sesuai prinsip nilai wajar PSAK 69 yang

telah disederhanakan. Dengan pendekatan ini, diharapkan para pelaku mampu meningkatkan akuntabilitas usaha, sehingga dapat memperluas akses terhadap lembaga keuangan, serta memperkuat keberlanjutan ekonomi lokal berbasis perikanan.

2. METODE

Pendekatan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode Participatory Action Research (PAR), yaitu pendekatan yang mengutamakan keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek sekaligus mitra dalam setiap tahapan kegiatan. Subjek dalam hal ini adalah pemilik, dan pengelola keramba jaring apung (KJA) Kawasan Danau Maninjau. Melalui PAR, kegiatan tidak hanya berupa transfer pengetahuan satu arah, tetapi lebih menekankan pada proses co-learning (belajar bersama), di mana pengetahuan akademik dikombinasikan dengan pengalaman lokal yang telah dimiliki masyarakat.

Prinsip utama kegiatan ini adalah pembelajaran partisipatif berbasis pengalaman nyata dan kondisi lokal. Artinya, materi yang diberikan tidak bersifat normatif atau teoretis semata, melainkan langsung dikaitkan dengan praktik budidaya keramba jaring apung (KJA) yang dijalankan peserta sehari-hari. Sehingga diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara standar akuntansi formal yang kompleks dengan kebutuhan pencatatan sederhana di tingkat UMKM.

Tahapan Kegiatan

1. Focus Group Discussion (FGD)

Tahap awal kegiatan dilakukan melalui FGD yang bertujuan untuk menggali pengetahuan, persepsi, dan praktik akuntansi yang selama ini digunakan oleh pelaku budidaya ikan. Dalam forum ini, kasus nyata terkait budidaya KJA dijadikan bahan diskusi, termasuk tantangan teknis (seperti mortalitas ikan akibat kondisi ekologis danau) maupun tantangan manajerial (seperti pencatatan transaksi usaha yang belum sistematis). Melalui proses diskusi, peserta didorong untuk mengidentifikasi kendala utama dalam usaha mereka, sekaligus berbagi pengalaman terkait pencatatan keuangan.

2. Pendampingan Teknis

Setelah peserta memahami kesenjangan antara praktik mereka dengan standar akuntansi, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan teknis. Pada tahap ini, peserta diperkenalkan pada metode pencatatan transaksi sederhana dengan menggunakan buku kas harian. Pendampingan dilakukan secara intensif melalui praktik langsung dengan menggunakan data usaha peserta sendiri, sehingga pencatatan yang dilakukan tidak hanya bersifat simulasi, melainkan benar-benar menggambarkan kondisi usaha yang mereka jalankan.

3. Simulasi Penyusunan Laporan Keuangan Aset Biologis

Tahap berikutnya adalah simulasi penyusunan laporan keuangan sederhana berbasis nilai wajar sesuai PSAK 69, namun telah disesuaikan dengan skala UMKM. Simulasi dilakukan secara bertahap, dimulai dari pencatatan manual, pengelompokan transaksi, hingga penyajian laporan keuangan sederhana berupa laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Model laporan yang digunakan bukanlah bentuk standar perusahaan besar, tetapi disederhanakan agar lebih relevan dan mudah diterapkan.

4. Evaluasi dan Refleksi Bersama

Sebagai bagian dari pendekatan PAR, kegiatan ditutup dengan sesi evaluasi dan refleksi. Peserta didorong untuk menyampaikan pengalaman mereka selama mengikuti program, kesulitan yang masih dihadapi, serta rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Proses refleksi ini penting untuk menilai sejauh mana pengetahuan dan keterampilan baru dapat diaplikasikan, sekaligus menjadi bahan perbaikan bagi kegiatan pengabdian selanjutnya.

Indikator Keberhasilan dan Output

1. Peningkatan Literasi Akuntansi

- Minimal 80% peserta mampu memahami perbedaan antara pencatatan berbasis biaya historis dan nilai wajar.
- Adanya peningkatan skor pemahaman akuntansi (pre-test dan post-test) minimal 30%.

2. Penyusunan Laporan Keuangan Aset Biologis berdasarkan PSAK 69

- Minimal 70% peserta mampu menyusun laporan keuangan sederhana (laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan) berbasis nilai wajar PSAK 69 yang telah disesuaikan dengan skala UMKM.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kawasan Danau Maninjau, Kabupaten Agam, yang merupakan salah satu pusat budidaya ikan air tawar dengan sistem Keramba Jaring Apung (KJA). Subjek kegiatan adalah pemilik dan pengelola KJA yang selama ini masih mengandalkan pencatatan sederhana berbasis pengalaman. Minimnya pemahaman akuntansi menyebabkan mereka kesulitan menyusun laporan keuangan yang sesuai standar, khususnya terkait aset biologis sebagaimana diatur dalam PSAK 69.

Melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR), kegiatan dirancang sebagai proses co-learning, di mana standar akuntansi formal dipadukan dengan praktik lokal peserta. Hal ini penting agar konsep PSAK 69 yang berbasis nilai wajar bisa diterjemahkan ke dalam praktik pencatatan sederhana yang sesuai skala UMKM.

Gambaran Tahapan Kegiatan dan Temuan Lapangan

1. Focus Group Discussion (FGD)

Pada tahap awal, peserta diajak mendiskusikan praktik pencatatan yang selama ini digunakan.

- Temuan lapangan: sebagian besar pelaku usaha hanya mencatat *uang keluar* untuk pakan dan *uang masuk* dari hasil penjualan ikan, tanpa memisahkan aset yang masih dalam proses (ikan dalam keramba). Bahkan ada peserta yang mengaku hanya mengingat perkiraan modal dan hasil tanpa catatan tertulis.
- Dari diskusi juga terungkap adanya persepsi bahwa ikan yang belum dijual “belum menjadi uang”, sehingga tidak dianggap sebagai aset. Hal ini menunjukkan kesenjangan pemahaman terhadap konsep nilai wajar aset biologis.



Gambar 1. Kondisi Aset Berujud dan Kondisi Aset Biologis KJA Maninjau

2. Pendampingan Teknis

Peserta kemudian didampingi untuk mulai melakukan pencatatan dengan buku kas harian sederhana.

- Temuan lapangan: beberapa peserta kesulitan membedakan biaya pribadi dengan biaya usaha, misalnya pengeluaran untuk solar perahu kadang dicatat bercampur dengan biaya rumah tangga.

- o Ada juga yang baru menyadari pentingnya memisahkan pembelian pakan untuk ikan dari keramba yang berbeda, karena akan berpengaruh pada penghitungan nilai aset masing-masing keramba.



Gambar 2. Pendampingan Teknis dan Simulasi Penyusunan Laporan Keuangan

3. **Simulasi Penyusunan Laporan Keuangan Aset Biologis (PSAK 69)**

Pada tahap ini peserta melakukan simulasi pencatatan hingga penyajian laporan keuangan sederhana.

- o Temuan lapangan: peserta awalnya kesulitan memahami bagaimana menilai ikan dalam keramba sebagai aset. Setelah diberikan contoh perhitungan berbasis harga pasar lokal (misalnya Rp 28.000/kg untuk ikan nila ukuran konsumsi), mereka mulai memahami bahwa ikan yang masih hidup dalam keramba bisa dinilai dan dicatat sebagai aset biologis.
- o Contoh konkret yang muncul adalah seorang peserta dengan 4 keramba berisi ±2.000 ekor ikan, yang sebelumnya hanya dianggap sebagai “modal tertanam”. Setelah simulasi, ia mampu menyajikan nilai ikan tersebut sebagai aset biologis dengan nilai wajar sekitar Rp 56 juta, dan hal ini sangat membuka wawasan peserta lain.

CARANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	3.1	462.503.094
Piutang usaha	3.2	16.491.374
Piutang lain-lain	3.3	2.000.000
Persediaan	3.4	275.810.516
Jumlah Aset Lancar		756.804.984
ASET TIDAK LANCAR		
ASET BIOLOGIS	3.5	2.483.607.371
Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp.4.095.864.815,- pada tahun 2024		
ASET TETAP	3.6	28.371.063.937
Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp.1.020.417.141,- pada tahun 2024		
Aset Dalam Pembangunan	3.7	7.110.532.668
Jumlah Aset		37.965.203.975
JUMLAH ASET		38.722.008.959

Gambar 3. Laporan Posisi Keuangan Aset Biologis pada UMKM KJA Maninjau

4. **Evaluasi dan Refleksi Bersama**

Pada tahap akhir, peserta memberikan umpan balik mengenai pengalaman mereka.

- o Temuan lapangan: sebagian peserta menyatakan pencatatan berbasis nilai wajar membuat mereka lebih “melihat” nilai usaha sebenarnya, bukan hanya uang tunai di tangan.

- Peserta juga menyadari bahwa dengan adanya laporan sederhana, mereka memiliki dokumen yang bisa digunakan sebagai dasar jika ingin mengakses bantuan modal atau kredit usaha.



Gambar 4. (a) Evaluasi Awal Kegiatan, (b) Evaluasi Akhir, (c) Refleksi Bersama

Hasil Pengabdian

Berdasarkan indikator keberhasilan yang ditetapkan, kegiatan pengabdian ini menghasilkan beberapa capaian utama:

1. Peningkatan Literasi Akuntansi

Hasil pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terkait perbedaan biaya historis dan nilai wajar dengan rata-rata kenaikan skor sebesar 35%. Sebanyak 85% peserta mampu menjelaskan secara sederhana perbedaan antara biaya pakan (historis) dan nilai ikan dalam keramba (nilai wajar sebagai aset biologis).

2. Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Aset Biologis

Sekitar 72% peserta berhasil menyusun laporan laba rugi sederhana dan laporan posisi keuangan dengan mengacu pada PSAK 69. Peserta yang berhasil menyusun laporan ini menggunakan format laporan sederhana hasil pendampingan, sehingga lebih mudah diadopsi secara berkelanjutan.

3. Perubahan Praktik Pencatatan

Sebagian peserta mulai menerapkan buku kas harian dan mencatat nilai estimasi ikan sebagai bagian dari laporan keuangan. Hal ini menjadi langkah awal untuk meningkatkan akuntabilitas usaha dan membuka peluang akses pembiayaan formal di kemudian hari.

4. Penguatan Kesadaran Kolektif

Peserta sepakat untuk membentuk kelompok kecil yang bertugas saling membantu dalam menyusun laporan keuangan. Keputusan ini memperlihatkan munculnya kesadaran kolektif untuk menjaga keberlanjutan praktik akuntansi yang sesuai dengan PSAK 69.

Dengan demikian, kegiatan ini menunjukkan bahwa **diseminasi** PSAK 69 pada UMKM budidaya ikan di Danau Maninjau dapat dilakukan secara efektif dengan pendekatan PAR. Keberhasilan utama bukan hanya terletak pada penyusunan laporan keuangan, tetapi juga pada terbentuknya pemahaman baru bahwa aset biologis (ikan dalam keramba) memiliki nilai yang dapat diukur dan dilaporkan secara akuntabel.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini telah memberikan kontribusi nyata dalam upaya meningkatkan literasi akuntansi pelaku usaha Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Maninjau, khususnya dalam hal **diseminasi penyajian laporan keuangan aset biologis berbasis PSAK 69**. Melalui pendekatan **Participatory Action Research (PAR)**, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoretis, tetapi juga keterampilan praktis untuk menyusun laporan keuangan sederhana yang relevan dengan skala usaha mereka. Dari pelaksanaan kegiatan ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Kelebihan Kegiatan

- a. Metode Participatory Action Research (PAR) berhasil meningkatkan partisipasi aktif peserta sehingga proses pembelajaran lebih bermakna.
- b. Peserta mampu memahami konsep dasar PSAK 69, khususnya perbedaan antara pencatatan biaya historis dan nilai wajar.
- c. Terjadi peningkatan literasi akuntansi; hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan pemahaman rata-rata 35%.
- d. Sekitar 72% peserta berhasil menyusun laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi sederhana berbasis nilai wajar, menandakan penerapan nyata dari materi.
- e. Tersedianya format laporan sederhana yang lebih sesuai untuk skala UMKM menjadi produk praktis yang bisa digunakan peserta ke depan.

Kekurangan Kegiatan

- a. Keterbatasan waktu membuat pendampingan belum dapat menjangkau seluruh variasi kasus usaha peserta.
- b. Sebagian peserta masih kesulitan memahami konsep nilai wajar, terutama ketika harga pasar ikan fluktuatif.
- c. Fasilitasi teknologi digital (misalnya penggunaan aplikasi akuntansi sederhana) belum sempat diterapkan karena keterbatasan perangkat dan kesiapan peserta.

Pengembangan Berikutnya

- a. Perlu dibuat modul dan template digital (misalnya Excel atau aplikasi mobile sederhana) agar peserta lebih mudah melakukan pencatatan keuangan berbasis PSAK 69.
- b. Pendampingan lanjutan sebaiknya mencakup pelatihan akses pembiayaan perbankan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat digunakan sebagai dasar memperoleh modal usaha.
- c. Disarankan adanya kolaborasi dengan pemerintah daerah atau koperasi perikanan agar implementasi pencatatan keuangan sesuai PSAK 69 bisa dijalankan secara berkelanjutan dan meluas.
- d. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengukur dampak penyusunan laporan aset biologis ini terhadap kinerja keuangan UMKM perikanan dalam jangka panjang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat pemilik dan pengelola Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Maninjau yang telah berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Program Departemen Akuntansi Universitas Riau dan Universitas Islam Riau yang memberikan ruang kolaborasi kegiatan pengabdian ini, sehingga kegiatan diseminasi penyajian laporan keuangan aset biologis berbasis PSAK 69 ini dapat terlaksana dengan baik. Diharapkan kerja

sama ini dapat terus berlanjut dalam bentuk pendampingan berkelanjutan demi terwujudnya pengelolaan usaha perikanan yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Sensus Pertanian 2023*. BPS RI.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. (2022). *Statistik Perikanan Budidaya Sumatera Barat*. Padang: DKP Sumbar.
- Handayani, S., dan Yuliasuti, R. (2021). Analisis penerapan PSAK 69 pada usaha kecil sektor agrikultur. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 345–360.
- Herawaty, V., dan Wiryadi, H. (2020). PSAK 69 Agrikultur: Tantangan penerapan nilai wajar. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 6(1), 15–28.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 69: Agrikultur*. Jakarta: IAI.
- Kaba12Merdeka. (2023). Ribuan keramba di Danau Maninjau masih beroperasi aktif. <http://Kaba12Merdeka.com>
- Meilansari, R., Maslichah, dan Mawardi, M. (2019). Analisis implementasi PSAK 69 pada perusahaan agrikultur. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 8(4), 52–62.
- Prasetyo, A. (2022). Kendala penerapan PSAK 69 pada UMKM agrikultur. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(2), 120–135.
- Putri, A., dan Santoso, T. (2021). Regulasi dan insentif dalam penerapan PSAK 69: Studi kasus UMKM perikanan. *Jurnal Kebijakan Akuntansi*, 9(1), 77–89.
- Sari, Wa Ode Irma, Ditya Wardana, dan Layly Dwi Rohmatunnisa. (2021). Laporan Keuangan Sebagai Alat Penilaian Kinerja Bisnis Pada UMKM, *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 331-338
- Simanjuntak, D. (2020). Implementasi PSAK 69 pada aset biologis: Antara teori dan praktik. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 9(2), 101–115.
- Syandri, H., Azrita, A., dan Melani, V. (2020). Dampak budidaya ikan dalam keramba jaring apung terhadap kualitas air Danau Maninjau. *Jurnal Limnologi Indonesia*, 6(1), 25–37.